

### BAB III

## PRIORITAS PEMBANGUNAN

Sebagai tahun pertama pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2009-2014, kebijakan pembangunan kabupaten Garut pada tahun 2010 secara umum diarahkan kepada peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka disusunlah Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2010 dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada serta memperhatikan isu strategis dan ditindaklanjuti oleh program-program yang bertujuan untuk mewujudkan amanat Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2009-2014.

Guna mewujudkan aspek keberlanjutan serta sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah, maka dalam penyusunan prioritas pembangunan Kabupaten Garut tahun 2010 turut memperhatikan pula tema pembangunan nasional tahun 2010 yaitu "**Pemulihan Perekonomian Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat**", yang dijabarkan kedalam 5 prioritas pembangunan nasional meliputi pertama Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, serta Penataan Kelembagaan dan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial. Kedua, Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Indonesia; Ketiga, Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Hukum, serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Nasional; Keempat, Pemulihan Ekonomi yang Didukung oleh Pembangunan Pertanian, infrastruktur dan Energi; Kelima, Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kapasitas Penanganan Perubahan Iklim.

Disamping itu, memperhatikan pula tema pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2010 yaitu '**Mewujudkan Satu Kesatuan Pembangunan Jawa Barat yang Bermutu dan Akuntabel Dalam Rangka Pencapaian Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera**' dengan prioritas pembangunan Jawa Barat melalui rumusan 9 *Common Goals* (Peningkatan Kualitas Pendidikan, Peningkatan Kualitas Kesehatan, Kemandirian Pangan, Peningkatan Daya Beli Masyarakat, Peningkatan Kinerja Aparatur, Penanganan Bencana dan Pengendalian Lingkungan Hidup, Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Pengembangan Energi dan Pembangunan Perdesaan) serta Program *Non Common Goal* (Rintisan; Tupoksi SKPD dan *Fixed cost*).

Dalam upaya memberikan fokus yang lebih jelas terhadap pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Garut, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2010 disusun dengan berorientasi pada upaya mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2009-2014. Berdasarkan hal itu, maka dirumuskan prioritas pembangunan untuk menjawab permasalahan mendesak yang dihadapi dan mengantisipasi tantangan ke depan, dengan memperhatikan pula kerangka ekonomi makro sebagai gambaran perekonomian daerah pada tahun 2010, agar dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi, serta dapat menanggulangi permasalahan mendasar daerah terutama kemiskinan dan pengangguran, dengan tetap mempertahankan stabilitas ekonomi. Prioritas pembangunan tersebut disusun berdasarkan tema "**Pembangunan ekonomi berbasis agribisnis, agroindustri, pariwisata dan kelautan yang berdaya**

**saing melalui pemberdayaan masyarakat disertai peningkatan kualitas pelayanan publik”,** yang berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dimana seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2010 oleh semua Organisasi Perangkat Daerah, secara langsung maupun tidak langsung, diarahkan sebagai langkah nyata peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan tema pembangunan tahun 2010 tersebut, dirumuskan tujuan utama pembangunan (*Main Development Goals*) Tahun 2010 meliputi :

### **1. Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah**

Difokuskan pada :

- a. Peningkatan sinergitas, produktivitas dan akuntabilitas manajemen pemerintah daerah.
- b. Penataan hubungan kemitraan eksekutif dan legislatif yang menjamin tata kelola pemerintahan yang baik.
- c. Peningkatan peran dan fungsi kecamatan selaku SKPD.
- d. Fasilitasi dan koordinasi persiapan penataan daerah otonom baru.

### **2. Pengembangan kapasitas pemerintahan desa**

Difokuskan pada :

- a. Penguatan kelembagaan pemerintahan desa dan masyarakat dalam gerakan desa membangun.
- b. Penguatan kelembagaan dan usaha perekonomian desa.
- c. Pengembangan infrastruktur dasar perdesaan.

### **3. Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Difokuskan pada :

- a. Peningkatan Rata- Rata Lama Sekolah (RLS) dan penuntasan buta huruf.
- b. Peningkatan akses mutu pelayanan kesehatan dasar, peningkatan Linakes, peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan penanggulangan penyakit menular.
- c. Meningkatkan potensi tenaga kerja pedesaan dan perkotaan.
- d. Peningkatan pelayanan jaminan perlindungan sosial masyarakat dan pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya.
- e. Pemberdayaan masyarakat dalam program Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi.

### **4. Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat**

Difokuskan pada :

- a. Peningkatan kemampuan teknis dan manajerial pelaku ekonomi untuk kebutuhan industri pengolahan.
- b. Peningkatan keterlibatan masyarakat pada kegiatan perekonomian di sektor pariwisata, agribisnis dan agroindustri serta kelautan.
- c. Peningkatan peran kelembagaan dalam perekonomian daerah melalui peningkatan kegiatan ekonomi pesantren dan lumbung desa.

- d. Perluasan pasar dan jejaring kerja ekonomi.

## 5. Pengembangan Infrastruktur dan Energi

Difokuskan pada:

- a. Penyediaan *Master Plan* peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah.
- b. Peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan jalan pada pusat pertumbuhan, antar kecamatan, kawasan wisata dan jalur produksi.
- c. Peningkatan infrastruktur irigasi dan pendayagunaan sumber daya air.
- d. Penyediaan dan pengelolaan air baku dan air bersih.
- e. Pelaksanaan feasibility study terminal angkutan jalan Tipe A dan Tipe B.
- f. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan energi sumber daya mineral dan ketenagalistrikan.

## 6. Penataan Ruang dan Pengendalian Lingkungan Hidup

Difokuskan pada:

- a. Penyusunan rencana penataan ruang yang berkualitas, implementatif dan berkelanjutan.
- b. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan persampahan.
- c. Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan.
- d. Formulasi penurunan tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan, dan resiko bencana.

Selain itu, dalam upaya percepatan perwujudan misi kepala daerah, digulirkan kebijakan khusus Bupati melalui program "**Bakti Ka Desa**" (*Bantuan Keuangan Bupati Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa*) tahun 2010 yang terdiri dari :

1. Kebijakan "Desa Membangun" melalui peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Peningkatan infrastruktur perdesaan.
3. Program Pendanaan Kompetitif (PPK) melalui:
  - a. Pemberdayaan ekonomi desa melalui Lumbung Desa/ Bumdes.
  - b. Pemberdayaan perekonomian melalui pondok pesantren.

Sebelum uraian mengenai prioritas dan fokus pembangunan tahun 2010, di bawah ini terlebih dahulu disajikan hasil evaluasi terhadap kondisi ekonomi sampai tahun 2008, serta perkiraan kondisi ekonomi pada tahun 2010, yaitu sebagai berikut :

### 3.1 Kerangka Ekonomi Daerah

Kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan memberikan gambaran mengenai kemajuan ekonomi yang harus dicapai sampai tahun 2010. Perkiraan ekonomi makro daerah tersebut akan dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah kebijakan yang disusun untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang dapat menanggulangi

permasalahan mendasar daerah terutama kemiskinan dan pengangguran dengan tetap mempertahankan stabilitas ekonomi.

### 3.1.1 Kondisi Ekonomi Sampai Tahun 2008

Dalam periode tahun 2004-2008, kondisi perekonomian makro Kabupaten Garut mengalami pertumbuhan yang cukup mengembirakan, dengan LPE diproyeksikan Tahun 2008 mencapai sebesar 4,79% dibandingkan dengan Tahun 2004 sebesar 4,01% (Angka Perbaikan) atau lebih tinggi 0,78%. Apabila dibandingkan dengan pencapaian LPE pada tahun 2007 sebesar 4,76%, LPE di tahun 2008 ini lebih tinggi 0,3%. Perkembangan positif dari perekonomian di Kabupaten Garut tersebut tidak lepas dari peningkatan kinerja pada sektor yang sangat dominan di wilayah ini, yaitu sektor pertanian dan perdagangan yang diproyeksikan mampu tumbuh masing-masing sebesar 4,19% dan 4,18%, yang juga didukung oleh stabilitas ekonomi nasional yang tetap terjaga, meningkatnya perdagangan dalam dan luar negeri, konsumsi serta bertambahnya kegiatan investasi.

Hal yang juga mendukung peningkatan LPE adalah terkendalinya laju inflasi, meskipun mengalami perkembangan yang berfluktuatif dimana Inflasi pada tahun 2004 tercatat sebesar 5,92% (Angka Regional) dan pada tahun 2008 diproyeksikan mencapai sebesar 13,26% (angka sangat sementara) sebagai dampak yang dirasakan akibat kenaikan BBM pada bulan Juni 2008, atau lebih tinggi 7,34%.

Untuk tahun 2009, sebagai dampak dari meningkatnya kinerja sektor pertanian, LPE diproyeksikan meningkat mencapai angka sebesar 6,7%, dengan besaran kisaran laju inflasi diasumsikan tidak terjadi gejala fluktuasi yang berarti sehingga dapat diproyeksi masih berada pada kisaran sebesar 6% atau masih berada diambang batas kurang dari dua digit.

Total Investasi berdasarkan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) selama tahun 2008 sebesar Rp. 2.922,46 triliun terjadi peningkatan sebesar 18,68% dibandingkan tahun 2007 sebesar Rp. 2.462,37 triliun, sementara pada tahun 2006 sebesar Rp. 2.293,70 triliun.

Besaran prosentase laju investasi selama tahun 2008 tumbuh positif sebesar 18,68% (angka sementara) lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 7,35% (angka perbaikan), sementara pada tahun 2006 mencapai 15,63% (angka perbaikan). Jumlah investasi yang terus berkembang ini, mengindikasikan tingkat kepercayaan yang cukup tinggi dari masyarakat untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Garut, dan memiliki peran yang cukup besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi selama tahun 2007 – 2008. Untuk tahun 2009, nilai investasi diproyeksikan tumbuh dengan laju sebesar 13,11% menjadi sebesar Rp. 3,305 triliun.

Nilai Tambah Bruto (NTB) atau nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Garut telah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2008 atas dasar harga berlaku (angka sangat sementara) mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebesar

Rp 3,310 trilyun atau 18,68%, yaitu dari tahun 2007 sebesar Rp.17,715 trilyun (angka perbaikan) menjadi sebesar Rp. 21,025 trilyun pada tahun 2008. Kondisi tersebut menggambarkan perkembangan yang cukup signifikan dari nilai produk barang yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Garut untuk periode tahun 2007-2008. Kendati demikian, perkembangan tersebut belum dapat dijadikan sebagai tolok ukur dari peningkatan volume produk barang atau jasa di wilayah Garut, karena pada besaran PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku, masih terdapat inflasi yang sangat mempengaruhi terhadap harga barang maupun jasa secara umum. Untuk menganalisis perkembangan dari volume produk barang maupun jasa umumnya digunakan PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan. PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 2000, pada tahun 2008 mencapai Rp. 10,021 trilyun, atau mengalami peningkatan 4,79% dari tahun 2007 yang mencapai Rp. 9,563 trilyun (angka perbaikan). Kondisi tersebut merupakan indikasi quantum (volume) produk barang/jasa secara umum mengalami peningkatan atau perekonomian Kabupaten Garut secara makro berkembang positif selama periode tahun 2007-2008 dengan besaran 4,79%.

Pada tahun 2009 nilai PDRB atas harga konstan diproyeksikan sebesar Rp. 10,693 Trilyun dan sebesar Rp. 23,780 trilyun atas dasar harga berlaku.

Selanjutnya struktur perekonomian Kabupaten Garut, sampai dengan tahun 2008, masih diberi warna yang dominan oleh sektor pertanian, yakni dengan kontribusi pembentukan nilai tambah sebesar 47,14% terhadap PDRB, disusul oleh sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 25,89%, sementara kontribusi dari sektor lainnya dibawah 10%. Hal ini dapat dipahami karena sektor pertanian dengan pengelolaan yang cenderung masih tradisional, tidak tergantung pada bahan impor dan berbasis teknologi sederhana, merupakan usaha yang banyak digeluti oleh masyarakat Garut sampai saat ini.

Seperti tahun-tahun sebelumnya pada 2009 struktur perekonomian diperkirakan masih akan didominasi oleh sektor pertanian sebesar 45,94% dan sektor perdagangan sebesar 25,87%.

Dalam bidang ketenagakerjaan jumlah penduduk usia kerja 10 tahun keatas pada tahun 2008 mengalami peningkatan 2,11% dari 1.784.487 orang pada tahun 2007 menjadi 1.822.092 orang pada tahun 2008, dengan jumlah penduduk usia kerja 10 tahun keatas yang tergolong sebagai angkatan kerja pada tahun 2008 sebanyak 990.942 orang atau 54,38% dari jumlah usia kerja yang meningkat 0,34% dari tahun 2007 sebanyak 987.607 orang atau 55,34% dari jumlah usia kerja. Jumlah penduduk bekerja mengalami peningkatan 0,45% dari 886.746 orang pada tahun 2007 menjadi 890.740 orang pada tahun 2008 dan jumlah pengangguran terbuka sedikit menurun dari 100.861 orang atau 10,21% dari jumlah angkatan kerja pada tahun 2007 menjadi 100.202 orang atau 10,11% dari jumlah angkatan kerja pada tahun 2008. Hal ini mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang begitu besar memang belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor produksi, sebagai

akibat lapangan pekerjaan yang kurang dan tingkat kompetensi angkatan kerja yang rendah. Pada 2009 jumlah penduduk yang bekerja 10 tahun keatas diproyeksikan meningkat menjadi sebanyak 908.370 orang dengan jumlah pengangguran terbuka diproyeksikan sebanyak 97.731 orang atau 9,71% dari jumlah angkatan kerja sebanyak 1.006.101 orang.

Kabupaten Garut juga mempunyai masalah kependudukan lainnya, yaitu masih tingginya angka kemiskinan. Sampai tahun 2008 jumlah penduduk miskin diperkirakan mencapai sebanyak 359.289 jiwa dengan proporsi sebesar 15,32% dari seluruh penduduk atau menurun 0,7% dari tahun 2007 sebanyak 361.835 jiwa dengan proporsi sebesar 15,67% dari seluruh penduduk. Melalui berbagai intervensi program dan kegiatan yang berpihak kepada penduduk miskin, pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin diharapkan dapat menurun kembali menjadi sebanyak 352.651 jiwa atau sebesar 14,81% dari total penduduk.

Dari sisi gambaran daya beli masyarakat, PDRB perkapita pada tahun 2008 diproyeksikan mencapai Rp. 8.965.603 yang meningkat 16,90% dari sebesar Rp. 7.669.678 pada tahun 2007, PDRB perkapita masih mencapai Rp.5.137.426 (angka perbaikan). Namun demikian, peningkatan tersebut belum dapat memberi indikasi terhadap gambaran performa peningkatan daya beli masyarakat, karena pada PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga berlaku, selain masih dipengaruhi oleh besaran inflasi terhadap daya beli, juga karena pola distribusi dari pendapatan regional Kabupaten Garut tidak mutlak merata. Namun, pendapatan per kapita menurut pendekatan PDRB per kapita dapat menggambarkan nilai produksi yang dihasilkan di wilayah Garut per-penduduk selama kurun waktu satu tahun, atau dapat pula diasumsikan sebagai tingkat produktifitas penduduk di Kabupaten Garut yang juga sekaligus merefleksikan tingkat pendapatan per-penduduk di Kabupaten Garut. Dengan asumsi pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 1,53% serta inflasi sebesar 6%, maka pendapatan riil per-kapita masyarakat untuk tahun 2009 diperkirakan sebesar Rp 9.987.871.

### **3.1.2 Perkiraan Kondisi Ekonomi Tahun 2010**

Dalam rangka proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah dengan pemerintah daerah diwujudkan melalui integrasi program dan kegiatan pembangunan dalam menghadapi permasalahan serta tantangan global dan nasional yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik di kabupaten Garut, sehingga implementasi pembangunan nasional dan daerah dapat berjalan secara optimal, terpadu dan berkesinambungan.

Untuk itu, penyusunan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2010 perlu disesuaikan dengan prakiraan asumsi ekonomi makro untuk APBN Tahun Anggaran 2010 antara lain; pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen, laju inflasi sebesar 5,0 persen, angka pengangguran terbuka

diperkirakan turun menjadi 8 persen dari angkatan kerja, jumlah penduduk miskin diperkirakan turun menjadi 12-13,5% pada tahun 2010. Selain itu, kondisi keuangan negara tahun 2010 diperkirakan akan mengalami defisit APBN sebesar 1,3 persen dari PDB. Dengan demikian, pemerintah daerah harus semakin berhati-hati dalam mengefektifkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan daerah dan lebih mengutamakan untuk program-program yang terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan infrastruktur dasar guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terkait upaya untuk mengatasi dampak krisis global pemerintah daerah berkewajiban untuk turut mensukseskan 7 prioritas penanggulangan krisis global tersebut, yaitu: 1) mencegah terjadinya gelombang PHK yang tidak perlu; 2) Menjaga sektor riil, dengan insentif dan kebijakan khusus; 3) menjaga inflasi; 4) menjaga daya beli masyarakat; 5) Memproteksi rakyat miskin; 6) Menjaga pasokan pangan dan energy; 7) Pertumbuhan bisa dijaga mencapai 4,5%.

Untuk mencapai sasaran tersebut maka pertumbuhan ekonomi sampai tahun 2010 diupayakan didorong agar tidak menurun dengan proyeksi yang tetap dapat mencapai 5,99%, dengan lebih fokus terhadap peningkatan laju pertumbuhan sektor-sektor unggulan diantaranya sektor pertanian, sektor perdagangan dan industri yang diharapkan dapat mengungkit pembangunan perekonomian masyarakat sebagai upaya pencegahan bertambahnya angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi sampai tahun 2010, jika dianalisis berdasarkan sektor ekonomi, diperkirakan akan mengalami banyak tantangan dan hambatan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, diharapkan masih akan ditopang oleh dominasi sektor pertanian sebesar 45,77% serta sektor perdagangan sebesar 25,65%, dengan struktur yang mengalami pergeseran dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier. Pada tahun 2010 nilai PDRB atas harga konstan diproyeksikan mencapai Rp. 11,333 Trilyun dan sebesar Rp. 26,718 trilyun atas dasar harga berlaku dengan asumsi tetap terjaganya kondisi stabilitas ekonomi makro, seperti dapat dijaganya stabilitas nilai tukar rupiah, terkendalinya laju inflasi dan kestabilan suku bunga dalam negeri yang akan mempengaruhi prospek perekonomian Kabupaten Garut sampai tahun 2010.

Dengan pertumbuhan penduduk rata-rata 1,53% per tahun dan laju inflasi sebesar 6%, maka PDRB per kapita pada tahun 2010 diproyeksikan sekitar Rp. 11.052.455,- sedangkan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan diproyeksikan dapat mengurangi jumlah pengangguran terbuka untuk usia kerja 10 tahun keatas menjadi dibawah 96.785 orang pada tahun 2010 atau 9,57% dari angkatan kerja sebanyak 1.011.277 dan jumlah penduduk miskin diproyeksikan berada dibawah 347.421 orang atau 14,37% dari seluruh penduduk pada tahun 2010.

Dalam kaitan itu peranan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus dapat ditingkatkan melalui perbaikan iklim

investasi. Peranan masyarakat dan swasta harus dapat ditingkatkan dengan menggalakkan investasi dan meningkatkan sektor industri dan jasa. Nilai investasi diproyeksikan meningkat menjadi Rp.3.713,77 milyar dengan laju investasi sebesar 12,35% pada tahun 2010. Karena investasi merupakan salah satu daya dukung dan daya dorong serta memiliki peran yang cukup besar untuk menggerakkan dan meningkatkan roda perekonomian di daerah, maka seyogyanya pada tahun 2010 dibutuhkan langkah-langkah konkrit dan rencana aksi tindak yang implementatif dalam merumuskan skema tentang mekanisme sistem dan prosedur penanaman modal melalui model satu pintu dengan slogan singkat, mudah dan murah, kepada para calon investor baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Garut.

Sementara itu sebagai pelaksanaan dari konsolidasi fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dapat diungkit dengan proporsi terhadap pendapatan sebesar 7,04%.

Perkembangan perekonomian, yang ditunjukkan dengan indikator makro sebagai salah satu dasar bagi arah pembangunan Kabupaten Garut, akan direspon dan ditindaklanjuti melalui penetapan sasaran pencapaian yang merupakan upaya untuk mendorong kinerja semua *stakeholder* dalam seluruh tahapan proses pembangunan. Pencapaian indikator kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), diproyeksikan dapat mencapai 72,94 poin pada tahun 2010 yang diperoleh dari proyeksi pencapaian indeks kesehatan sebesar 67,35 poin, indeks pendidikan sebesar 82,48 poin dan indeks daya beli sebesar 69 poin.

Gambaran proyeksi pencapaian secara kuantitas indikator makro pembangunan Kabupaten Garut pada tahun 2010 disajikan pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1  
Proyeksi Pencapaian Indikator Makro Tahun 2010

No	INDIKATOR MAKRO	2007 (Angka Tetap)	2008	2009	2010
			(ANGKA PROYEKSI)		
1	Indeks Pembangunan Manusia	69,99	70,61	71,97	72,94
	Indeks Kesehatan	65,7	65,66	66,49	67,35
	Angka Harapan Hidup (tahun)	64,42	64,4	64,89	65,41
	Angka Kematian Bayi (Per Seribu Kelahiran Hidup)	52,77	52,42	51,65	50,89
	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kasus kelahiran)	237	228,43	219,64	210,86
	Indeks Pendidikan	81,7	81,93	82,32	82,48
	Angka Melek Huruf (%)	98,89	98,98	99,07	99,12
	Rata-Rata Lama sekolah (tahun)	7,1	7,17	7,32	7,38
	Indeks Daya Beli	62,56	64,23	67,1	69
	Kemampuan Daya Beli (000 Rp)	630,72	637,95	650,35	658,57
2	Jumlah Penduduk	2.309.774	2.345.108	2.380.981	2.417.404
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,53	1,53	1,53	1,53

No	INDIKATOR MAKRO	2007 (Angka Tetap)	2008	2009	2010
			(ANGKA PROYEKSI)		
4	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa *)	361.835	359.289	352.651	347.421
5	Angka Kelahiran Pddk Prpuan Pernah Kawin T( FR)	2,14	2,11	2,09	2,06
6	Jumlah Penduduk Yang Bekerja 10 TH +	886.746	890.740	908.370	914.492
7	KETENAGAKERJAAN				
	Usia Kerja 15 Tahun Keatas	1.534.494	1.570.507	1.594.532	1.618.924
	* Angkatan Kerja	911.309	918.596	921.456	924.326
	Pengangguran	49.829	50.134	50.091	49.242
	' TPT	5,47	5,46	5,44	5,33
	Usia Kerja 10 Tahun Keatas	1.784.487	1.822.092	1.849.965	1.878.265
	* Angkatan Kerja	987.607	990.942	1.006.101	1.011.277
	* Pengangguran	100.861	100.202	97.731	96.785
	* TPT	10,21	10,11	9,71	9,57
8	PDRB berlaku (Juta rp)	17.715.224	21.025.302	23.780.935	26.718.251
9	PDRB konstan '2000 (Juta rp)	9.563.128	10.021.184	10.693.007	11.333.736
10	Inflasi (%) Regional	7,72	13,26	6	6
11	Konsumsi Rumah Tangga (juta Rp)	13.204.308	15.671.525	17.725.477	19.914.850
12	Konsumsi Pemerintah (Juta Rp)	1.868.749	2.217.924	2.508.611	2.818.464
<b>13</b>	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)</b>	<b>4,76</b>	<b>4,79</b>	<b>6,7</b>	<b>5,99</b>
14	PDRB perkapita (Rp)	7.669.678	8.965.603	9.987.871	11.052.455
	PDRB perkapita a.d.h Konstan 2000	4.140.287	4.273.230	4.491.008	4.688.391
15	Investasi (Miliar)	2.462,37	2.922,46	3.305,49	3.713,77
16	Laju Investasi (%)	7,35	18,68	13,11	12,35

**Sumber :** BPS Kabupaten Garut, Januari 2009

Catatan: \*) untuk angka jumlah penduduk miskin Tahun 2005-2008 merupakan angka estimasi regional dan akan direvisi setelah angka pusat direalisasi

Asumsi Inflasi pada tahun 2009 dan 2010 sebesar 6 persen pertahun

### 3.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan evaluasi pembangunan pada tahun 2008, indikator kinerja yang harus dicapai dalam dokumen RPJMD Tahun 2009 – 2014 serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus ditanggulangi pada tahun 2010, maka sebagai prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2010 meliputi :

#### 3.2.1 Prioritas Pembangunan Misi 1: *Membangun kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi berlandaskan nilai agama, sosial dan budaya sesuai kearifan lokal*, meliputi :

1. Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun dan Pencanangan Wajar 12 Tahun.
2. Penuntasan buta huruf melalui keaksaraan fungsional.
3. Peningkatan partisipasi sekolah pada semua jenjang dan jalur pendidikan.
4. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing di semua jenjang dan jalur pendidikan.
5. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan pada semua jenjang dan jalur pendidikan.

6. Peningkatan kualitas pendidikan kejuruan.
7. Penyiapan tenaga kesehatan strategis dan peningkatan linakes.
8. Intensifikasi penyuluhan, pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
9. Pembangunan RSUD Pameungpeuk.
10. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja pedesaan dan perkotaan.
11. Peningkatan pelayanan jaminan perlindungan sosial dan pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya.
12. Road map kesetaraan gender dan peran pemuda dalam proses pembangunan.
13. Peningkatan pemahaman nilai-nilai budaya dan kearifan lokal melalui keluarga.

Arah kebijakan yang ditempuh untuk prioritas misi pertama diantaranya:

- 1) Pemerataan dan Perluasan akses pendidikan
- 2) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan
- 3) Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan
- 4) Meningkatkan kemampuan dan budaya baca masyarakat
- 5) Pengarusutamaan Gender bidang pendidikan
- 6) Mengembangkan sistem operasional pelayanan kesehatan dasar rujukan terutama bagi masyarakat miskin;
- 7) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
- 8) Meningkatkan akurasi dan aktualisasi data sebagai dasar perencanaan pembangunan kesehatan
- 9) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya kesehatan
- 10) Pengembangan akses pelayanan kesehatan rujukan
- 11) Menurunkan tingkat kelahiran (TFR) melalui pengendalian kehamilan serta meningkatkan jumlah cakupan peserta KB
- 12) Meningkatkan penggalan potensi, kemauan, kemampuan dan keterampilan serta sumber kehidupan PMKS
- 13) Pemberdayaan Kafilah dalam prestasi bidang keagamaan
- 14) Peningkatan kerukunan dan silaturahmi antar umat
- 15) Penataan pelayanan dalam bidang beribadah
- 16) Meningkatkan upaya implementasi kesalehan sosial baik di kalangan aparat maupun seluruh unsur masyarakat;
- 17) Implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat;
- 18) Implementasi pemahaman mengenai bahaya narkoba kepada masyarakat
- 19) Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian berusaha;
- 20) Pemberdayaan pemuda dalam proses pembangunan
- 21) Pembibitan, permasalahan dan peningkatan prestasi bidang olahraga
- 22) Menumbuhkan lapangan usaha kerja produktif untuk peningkatan daya beli masyarakat dan pengurangan pengangguran

**3.2.2 Prioritas Pembangunan Misi 2:** *Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis, agroindustri, kelautan dan pariwisata disertai pengembangan seni budaya daerah, meliputi :*

**A. Urusan Pertanian:**

1. Peningkatan produktifitas lahan dan lahan tidur.
2. Diversifikasi usaha petani ke agroindustri.
3. Penangkaran bibit kentang dan jeruk.
4. Peningkatan jumlah produksi dan variasi komoditi pangan masyarakat.
5. Pengembangan daya saing produktifitas lahan perkebunan.
6. Pembibitan ternak domba Garut dan sapi.
7. Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner.
8. Peningkatan sarana prasarana produksi dan kesehatan hewan.
9. Gerakan Ekonomi Mandiri Berbasis Agribisnis, Agroindustri, Kelautan dan Pariwisata.

**B. Urusan Pariwisata & Budaya:**

1. Pengembangan destinasi pariwisata pada SKW Cipanas, Pameungpeuk, dan Malangbong.
2. Penataan infrastruktur dasar SKW Cipanas, SKW Pameungpeuk dan agroindustri Malangbong.
3. Penyediaan sarana promosi pariwisata di tempat-tempat strategis.
4. Peningkatan apresiasi seni dan budaya daerah melalui pembangunan *Art Centre* dan Museum.
5. Gerakan Ekonomi Mandiri Berbasis Agribisnis, Agroindustri, Kelautan dan Pariwisata.

**C. Urusan Ketahanan Pangan :**

1. Pembentukan Cadangan pangan pemerintah.
2. Peningkatan ketersediaan, variasi pangan dan pemerataan penyebarannya.
3. Pembentukan Lumbung Desa.
4. Pembentukan Desa Mandiri Pangan.

**D. Urusan Kehutanan**

1. Penerapan pola tanam sistem konservasi pada lahan kritis dan DAS
2. Peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar hutan.
3. Gerakan Ekonomi Mandiri Berbasis Agribisnis, Agroindustri, Kelautan dan Pariwisata.

**E. Urusan Kelautan dan Perikanan.**

1. Perluasan area tangkap ikan laut dan peningkatan kemampuan peralatan tangkap ikan laut.
2. Diversifikasi usaha petani/nelayan ke agroindustri.
3. Peningkatan sarana dan prasarana pengolah hasil perikanan.
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
5. Gerakan Ekonomi Mandiri Berbasis Agribisnis, Agroindustri, Kelautan dan Pariwisata.

**F. Urusan Industri.**

1. Pengembangan IKM Agroindustri dan Industri Kreatif.
2. Penyediaan teknologi energi alternatif untuk Industri Kecil.
3. Gerakan Ekonomi Mandiri Berbasis Agribisnis, Agroindustri, Kelautan dan Pariwisata.

**G. Urusan Perdagangan**

1. Revitalisasi Pasar Tradisional
2. Pembinaan dan fasilitasi pelaku pasar tradisional.
3. Gerakan Ekonomi Mandiri Berbasis Agribisnis, Agroindustri, Kelautan dan Pariwisata.

**H. Urusan Koperasi dan UKM.**

1. Penumbuhan aktifitas ekonomi pada Pondok Pesantren.
2. Pembentukan Koperasi Berprestasi.
3. Gerakan Ekonomi Mandiri Berbasis Agribisnis, Agroindustri, Kelautan dan Pariwisata.

**I. Urusan Penanaman Modal.**

1. Pembentukan regulasi investasi daerah.  
Difokuskan kepada peningkatan iklim dan realisasi investasi.
2. Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah (Pembentukan BUMD dan BLUD).
3. Penanganan permasalahan BPR.
4. Penyertaan modal PDAM.

**J. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral**

1. Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Rakyat.
2. Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat yang berpotensi merusak lingkungan.
3. Regulasi kegiatan pengelolaan energi dan sumberdaya mineral.
4. Perencanaan pengembangan energi dan sumberdaya mineral.
5. Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan energi dan sumberdaya mineral.
6. Pemberdayaan masyarakat di bidang energi dan sumberdaya mineral.
7. Peningkatan aparaturnya pemerintah dan kelembagaan di bidang energi dan sumberdaya mineral.

Arah kebijakan yang ditempuh untuk prioritas misi kedua diantaranya:

- 1) Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan dan peternakan
- 2) Meningkatkan pembangunan sistem ketahanan pangan dan pengembangan penyuluhan pertanian
- 3) Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil kehutanan
- 4) Penataan sistem nilai budaya sunda yang berbudi luhur yang aplikasinya di masyarakat melalui pemasyarakatan nilai-nilai budi pekerti sunda disamping bahasa dan sastra sunda

- 5) Menjadikan pariwisata sebagai penarik aktifitas ekonomi yang mempunyai daya saing destinasi, produk dan usaha pariwisata
- 6) Meningkatkan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang berwawasan lingkungan
- 7) Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil industri IKM
- 8) Meningkatkan akses dan distribusi perdagangan
- 9) Meningkatkan Sistem Perdagangan
- 10) Meningkatkan peran KUMKM dalam perekonomian daerah, khususnya yang berbasis agribisnis agroindustri, kelautan dan pariwisata
- 11) Meningkatkan investasi di daerah
- 12) Meningkatkan Nilai tambah Produk Bahan Galian

**3.2.3 Prioritas Pembangunan Misi 3: Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan, meliputi :**

1. Rasionalisasi struktur kelembagaan dan jumlah aparatur pemerintah daerah.
2. Mengembangkan kompetensi aparatur yang profesional dan akuntabel.
3. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi kepegawaian secara terintegrasi serta meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan tepat sasaran.
4. Mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan bersifat aspiratif dan *bottom-up*.
5. Penyiapan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik.
6. Perumusan konsep SPM pada setiap OPD dalam peningkatan pelayanan publik.
7. Formulasi fungsi dan peran partai politik dalam sistem pemerintahan.
8. Penguatan kelembagaan pemerintahan desa dan masyarakat.
9. Optimalisasi fungsi pengawasan internal.
10. Penerapan sistem *reward* dan *punishment* dalam pembinaan pegawai dan penegakkan disiplin pegawai.
11. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam upaya meningkatkan kemampuan / pengetahuan pengelolaan barang milik daerah yang bersaing dan berkualitas.
12. Identifikasi pemekaran daerah otonomi baru.
13. Identifikasi dan penyiapan pemekaran wilayah otonomi baru.
14. Penanganan permasalahan pertanahan.

Arah kebijakan yang ditempuh untuk prioritas misi ketiga diantaranya:

- 1) Mengembangkan teknologi informasi dalam database pegawai (SIMPEG) sebagai bahan kebijakan kepegawaian;
- 2) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumberdaya aparatur
- 3) Mewujudkan penempatan aparatur sesuai dengan kompetensi
- 4) Terciptanya sinergitas pengelolaan administrasi kepegawaian

- 5) Meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai dalam rangka mewujudkan pelayanan prima;
- 6) Meningkatkan pengendalian pembangunan dan mengembangkan sistem pengawasan;
- 7) Mengembangkan dan menerapkan teknologi dan informasi dalam manajemen pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- 8) Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
- 9) Meningkatkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien.
- 10) Menata sistem hukum serta meningkatkan peran dan kapasitas lembaga legislatif;
- 11) Mewujudkan tertib pelayanan yang profesional dalam mendukung kinerja DPRD Kab. Garut
- 12) Mewujudkan demokrasi pemerintahan
- 13) Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan yang aspiratif, implementatif dan berkelanjutan
- 14) Meningkatkan partisipasi dan peran kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan;
- 15) Mewujudkan Desa Membangun
- 16) Meningkatkan pembinaan tramtibmas, satuan perlindungan masyarakat, dan unsur rakyat terlatih lainnya;
- 17) peningkatan pemahaman demokrasi dan penguatan fungsi partai politik, dan peningkatan pendidikan politik masyarakat
- 18) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik
- 19) Peningkatan peran dan fungsi Partai Politik
- 20) Mewujudkan tertib administrasi transparan dan akuntabel
- 21) Meningkatkan dan mengembangkan tertib administrasi kependudukan
- 22) Meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur
- 23) Meningkatkan pengawasan administrasi kependudukan dan informasi
- 24) Mengoptimalkan pendayagunaan teknologi komunikasi dan informatika untuk mewujudkan e-government.
- 25) Meningkatkan pelayanan Informasi dengan Media Massa dan Kelompok Informasi Masyarakat

**3.2.4 Prioritas Pembangunan Misi 4:** *Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis, agroindustri, kelautan dan pariwisata disertai pengembangan seni budaya daerah, meliputi :*

1. Penyusunan *Master Plan* peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah (Jalan dan jembatan).
2. Peningkatan kuantitas & kualitas jaringan jalan antar pusat pertumbuhan & Kecamatan.
3. Penyusunan RTBL pembangunan jalan By-Pass Garut .
4. Peningkatan infrastruktur irigasi dan pendayagunaan sumber daya air (Bendung Copong).
5. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.

6. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.
7. Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.
8. Pembinaan dan Pengembangan bidang Energi dan Ketenagalistrikan.
9. Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan.
10. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan persampahan, air bersih, air limbah.
11. Penyusunan rencana penataan ruang yang berkualitas, implementatif dan berkelanjutan.
12. Pelaksanaan Study Kelayakan (*Feasibility Study*) Terminal Angkutan Jalan Tipe A dan Tipe B
13. Pelaksanaan Study Kelayakan (*Feasibility Study*) penentuan lokasi Pelabuhan.

Arah kebijakan yang ditempuh untuk prioritas misi keempat diantaranya:

- 1) Meningkatkan kualitas dan daya dukung jalan dan jembatan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan;
- 2) Meningkatkan pengelolaan prasarana jalan dan jembatan
- 3) Meningkatnya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang memadai untuk menunjang kegiatan pertanian, industri dan kebutuhan domestik dengan memperhatikan upaya konservasi dan pengendalian daya rusak air
- 4) Mengembangkan infrastruktur perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa
- 5) Meningkatkan pasokan, cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan perdesaan dan rumah tangga
- 6) Meningkatkan ketersediaan energi alternatif yang ramah lingkungan
- 7) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pengambilan air tanah
- 8) Peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar Permukiman dan perumahan
- 9) Meningkatkan kualitas konstruksi bangunan Gedung pemerintah dan masyarakat
- 10) Meningkatkan kinerja penataan perkotaan dan perdesaan
- 11) Penataan penduduk sehingga tercapai keserasian antara daya tampung penduduk dengan daya tampung lingkungan
- 12) Peningkatan peran dan fungsi penataan ruang;
- 13) Peningkatan peran serta masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan ruang;
- 14) Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- 15) Kerjasama dan koordinasi dalam pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu;
- 16) Meningkatkan kemampuan masyarakat dan aparatur dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- 17) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
- 18) Meningkatkan pengamanan dan pencegahan kerusakan kawasan hutan;

- 19) Meningkatkan penanganan lahan kritis dan fungsi kawasan lindung;
- 20) Meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

### 3.3 Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Garut selama ini masih belum dapat mengatasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar wilayah, dalam hal ini kesenjangan antarwilayah baik antar kabupaten/kota maupun antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Guna menjamin keseimbangan pembangunan daerah antarwilayah di Kabupaten Garut maka perlu disusun suatu kebijakan pembangunan kewilayahan. Dalam rangka menciptakan suatu rentang kendali yang proporsional dan mencapai hasil yang optimal dalam pembangunan setiap wilayah di Kabupaten Garut maka difokuskan pengembangan pada pusat-pusat pelayanan wilayah dengan uraian sebagai berikut:

#### 1. Kawasan Tumbuh Cepat

Kawasan cepat tumbuh adalah kawasan budidaya yang didalamnya terdapat kegiatan-kegiatan produksi, jasa dan atau permukiman yang memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ekonomi wilayah Kabupaten Garut. Kawasan cepat tumbuh di Kabupaten Garut adalah sebagai berikut :

- Kawasan perkotaan Kota Garut yang meliputi wilayah Kecamatan Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Garut Kota, Banyuresmi, dan Karangpawitan.
- Kawasan koridor Kadungora – Garut.

Kawasan tersebut diidentifikasi sebagai kawasan cepat tumbuh karena memiliki ciri :

- Kegiatan jasa dan produksi yang mempunyai skala besar dan berperan secara regional.
- Mempunyai nilai tambah dan memberikan efek terhadap kegiatan ekonomi wilayah.
- Mempunyai fungsi sebagai pusat pertumbuhan yang berperan sebagai pendorong pengembangan wilayah.

Arahan pengembangan :

- Penataan kawasan untuk memberikan dukungan keruangan terhadap pengembangan kawasan.
- Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas pelayanan sarana dan prasarana.

#### 2. Wilayah/Kawasan Potensial Berkembang

Kawasan potensial berkembang di wilayah Kabupaten Garut adalah kawasan yang memiliki posisi strategis karena adanya pengaruh dari peningkatan aksesibilitas seperti pengembangan jalur lintas selatan Jawa Barat dan rencana pengembangan jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan - Palimanan.

- Pengembangan jalur lintas Selatan Jawa Barat akan berpengaruh terhadap perkembangan wilayah yang dilintasinya yaitu Kecamatan Cibalong, Pameungpeuk, Cikelet, Mekarmukti, Pakenjeng, Bungbulang dan Caringin.
- Pengembangan jalan tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan – Palimanan akan berpengaruh terhadap perkembangan wilayah yang dilintasinya yaitu Malangbong, Selaawi dan Baluburlimbangan.

Arahan pengembangan :

- Penataan kawasan untuk memberikan dukungan keruangan terhadap pengembangan kawasan.
- Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan sarana dan prasarana.
- Peningkatan akses.
- Meningkatkan potensi kawasan untuk memanfaatkan peluang yang ada.

### 3. Kawasan Yang Perlu Dipacu Perkembangannya

Kawasan yang perlu dipacu pengembangannya adalah kawasan yang secara ekonomi dan sosial jauh tertinggal dari kawasan lainnya, akibat kondisi lingkungan alam, sosial masyarakat, maupun kondisi infrastruktur yang tidak memadai. Kawasan yang perlu dipacu perkembangannya bukan berarti tidak memiliki sumberdaya, akan tetapi mungkin karena prioritas pembangunan tidak terarah pada kawasan tersebut yang dapat saja disebabkan oleh kesulitan medan lapangan untuk dilakukannya pembangunan.

Kawasan yang perlu dipacu perkembangannya di wilayah Kabupaten Garut adalah :

- Kawasan yang meliputi wilayah Kecamatan Cisewu dan Talegong.
- Kawasan yang meliputi wilayah Kecamatan Banjarwangi, Cisompet, Cihurip, Singajaya, dan Peundeuy.

Arahan pengembangan :

- Penataan kawasan untuk memberikan dukungan keruangan untuk memacu perkembangan kawasan.
- Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas pelayanan sarana dan prasarana.
- Membuka keterisolasian dan meningkatkan akses.